BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tuntutan akan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal perizinan berusaha. Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit selama ini dianggap sebagai salah satu hambatan utama dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan perizinan berusaha.

Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai perizinan yang dibutuhkan melalui satu platform. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi, memangkas waktu dan biaya perizinan, serta meningkatkan transparansi. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi berurusan dengan berbagai instansi pemerintah yang berbeda untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan. Cukup melalui satu platform OSS, semua perizinan dapat diurus secara terpadu.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan usaha. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah

sistem *Online Single Submission* (OSS) yang pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sistem OSS bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pengajuan izin usaha dengan mengintegrasikan berbagai perizinan dalam satu platform digital. OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lain yang diperlukan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses manual yang panjang.

Dalam implementasinya, sistem OSS mengalami berbagai pembaruan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Salah satu pembaruan penting adalah penerbitan Peraturan (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan kebijakan ini, perizinan berusaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, di mana usaha dengan risiko rendah cukup melakukan pendaftaran melalui OSS, sedangkan usaha dengan risiko tinggi memerlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintah.

Di Kota Bandung, sistem OSS diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan perizinan usaha. Kota Bandung sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Barat memiliki tingkat aktivitas bisnis yang tinggi, sehingga implementasi OSS menjadi sangat krusial untuk mendukung kemudahan berusaha. Berdasarkan laporan dari DPMPTSP Kota Bandung, pada

tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan perizinan melalui OSS dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah. DPMPTSP menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan OSS di tingkat daerah. Keberhasilan implementasi OSS di tingkat daerah sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan DPMPTSP dalam menjalankan sistem ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan OSS di DPMPTSP menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini telah diimplementasikan dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Perkembangan sektor industri dan jasa di Kota Bandung membutuhkan dukungan dari sistem perizinan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, Kota Bandung menjadi lokasi yang menarik untuk meneliti pelaksanaan kebijakan OSS. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan OSS dilaksanakan di DPMPTSP Kota Bandung, faktor yang menjadi penghambat keberlangsungan pelaksanaan implementasi OSS, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan OSS.

Implementasi OSS di Kota Bandung diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, pelaku usaha diharapkan dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan.

Namun, meskipun sistem OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait sistem OSS, kendala teknis dalam operasional sistem, serta koordinasi yang masih perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan ini. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur OSS, sehingga memerlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang belum berjalan dengan efektif.

1. Tepat pelaksanaan dilihat dari indikator kesiapan aktor, kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan OSS di DPMPTSP Kota Bandung. Jumlah NIB di Kota Bandung pada tahun 2024 yaitu 81.301 sedangkan pegawai yang mengawasi saat ini hanya 20-30 orang. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara jumlah pelaku usaha yang harus diawasi dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha menjadi tidak optimal.
2. Tepat lingkungan dilihat dari indikator lingkungan eksternal, perubahan peraturan pemerintah yang terus-menerus terkait dengan sistem OSS memberi dampak langsung kepada DPMPTSP. Setiap perubahan aturan

memerlukan penyesuaian dalam prosedur dan alur kerja, yang dapat menyebabkan kebingungan di tingkat DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Akibatnya, bisa menambah beban administratif bagi petugas DPMPTSP, menghambat kelancaran dalam pengurusan izin usaha, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengelolaan izin usaha.

Berdasarkan indikator masalah, peneliti dapat menjelaskan tabel pengukuran jumlah perbantuan pelayanan perizinan berusaha sistem OSS Tahun 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Tabel 1. 1
Jumlah Perbantuan Pelayanan Perizinan Berusaha
Sistem OSS Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Perbantuan OSS secara online	123	7,77%
2	Perbantuan OSS secara tatap muka	325	20,53%

Sumber: DPMPTSP Kota Bandung yang telah dimodifikasi oleh peneliti

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian berjudul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG”**.

Alasan pemilihan judul yang peneliti teliti ini karena berkaitan dengan disiplin ilmu administrasi publik, disamping itu pula dalam pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kota Bandung adanya beberapa persoalan berkaitan dengan belum efektifnya kebijakan tersebut.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil kajian data yang diperoleh dan permasalahan yang ditemui oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan penelitian terkait pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan berdasarkan 5 indikator dalam ketepatan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2017:761), yaitu:

1. Tepat Kebijakan,
2. Tepat Pelaksanaan,
3. Tepat Target,
4. Tepat Lingkungan,
5. Tepat Proses.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan pada Latar Belakang Penelitian ini, maka penulis merumuskan Masalah dengan memberikan Batasan-Batasan Masalah menjadi Pernyataan Penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat keberlangsungan pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian Permasalahan yang telah dirumuskan pada Penelitian ini, maka tujuan penulis yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor – faktor yang menjadi penghambat keberlangsungan pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui dan Mengkaji mengenai bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam keberlangsungan pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik dan juga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pemikiran mengenai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.